

**AKUNTABILITAS LSM, MILIK DONOR ATAU PUBLIK?
(STUDI ANALISIS WACANA STUDI PADA KANTOR EKSEKUTIF DAERAH
WALHI SULAWESI TENGAH)**

Meity Ferdiana Paskual
(Akuntansi - FE Univ. Tadulako Palu)

Muhammad Ansar
(Akuntansi - FE Univ. Tadulako Palu)

ABSTRAK

Sebuah penelitian kualitatif (*kualitatif research*), bertujuan untuk mendeskripsikan makna dan bentuk akuntabilitas keuangan Lembaga Swadaya Masyarakat studi pada WALHI Sulawesi Tengah. Adapun pendekatan analisis wacana digunakan untuk mengeksplorasi realitas akuntabilitas LSM berdasarkan paradigma *stakeholders*. Pengumpulan dan analisis data dilakukan melalui proses observasi, studi dokumentasi serta wawancara *snowball sampling* dengan memilih informasi yang penting dan relevan dengan permasalahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Pertama*, alur pertanggungjawaban sesuai dengan mekanisme kelembagaan LSM dalam hal pengelolaan sumber daya. *Kedua*, regulasi mengenai akuntabilitas publik belum memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi. *Ketiga*, adanya perbedaan persepsi antar *stakeholders* mengenai akuntabilitas publik LSM. *Keempat*, akuntabilitas publik LSM Sulawesi Tengah saat ini berdasarkan pada kesadaran masing-masing organisasi. *Kelima*, WALHI Sulawesi Tengah menyadari bahwa sebagai LSM, akuntabilitas publik merupakan hal yang penting untuk diwujudkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban LSM terhadap donor atas kewenangan dalam mengelola sumberdaya. Disisi lain, akuntabilitas publik akhirnya menjadi sebuah tuntutan penting bagi keberlangsungan LSM dalam iklim demokrasi, yang merupakan wujud dari perkembangan teknologi dan pola pikir manusia.

Kata kunci: Akuntabilitas Publik, Donor, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), *Stakeholders*

1. PENDAHULUAN

Reformasi politik mengantarkan Indonesia menjadi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia (Harun, 2009). Masyarakat menyadari bahwa demokrasi juga perlu diiringi dengan reformasi sektor publik melalui perbaikan kualitas kelembagaan publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari keberadaan lembaga-lembaga publik diluar pemerintah yang memperjuangkan hak masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut dikenal dengan nama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

LSM merupakan sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya (<http://id.wikipedia.org> , 2011). Lebih lanjut Teegan *et al.* (2004) dalam Fikri dkk. (2010) menyatakan bahwa karakteristik yang membedakan LSM dengan organisasi lain yaitu sebagai organisasi non profit yang tidak mencari keuntungan dalam sistem masyarakat.

Berdasarkan argumen di atas, dapat dilihat bahwa LSM juga merupakan organisasi sektor publik yang juga dituntut untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Kualitas kelembagaan publik ini harus didukung oleh tiga hal, yaitu: adanya lembaga yang efektif memberikan pelayanan sesuai kehendak *stakeholders*, efisien dalam penggunaan sumber daya serta adanya akuntabilitas keuangan yang baik terhadap masyarakat (Harun, 2009).

Seiring dengan sepak terjangnya, LSM kemudian menuai berbagai kritikan tajam. Dari artikel-artikel yang dimuat di berbagai media, penulis menemukan berbagai macam artikel yang membahas tentang akuntabilitas LSM. Fikri dkk. (2010) dalam jurnalnya juga mencatat beberapa penelitian yang menerangkan indikasi lemahnya akuntabilitas *Non Governmental Organization*, yang dapat dilihat dari laporan yang kebanyakan hanya ditujukan kepada donatur (Ebrahim, 2003; Goddard dan Assad, 2006), minimnya penyajian informasi

aktivitas organisasi kepada masyarakat (Kovach *et al.*, 2003) dan kurangnya pengawasan distribusi dana (Dixon *et al.*, 2006)

Berbagai kritik yang muncul menyangkut akuntabilitas LSM tentu dapat disebabkan oleh banyak faktor, baik dari pihak eksternal maupun internal LSM itu sendiri. Tidak dapat dipungkiri bahwa bisa saja ada faktor subjektifitas pihak eksternal yang “bermain” didalamnya. Ketidapahaman individu diluar organisasi juga dapat menjadi pemicu munculnya kritikan. Dilain sisi, faktor regulasi juga dianggap belum mampu mengatur jalannya roda kepengurusan dalam LSM. Terbukti dengan adanya temuan-temuan kasus penyimpangan oleh aktivis LSM (<http://www.interseksi.org>, 2010) yang semakin memacu terciptanya wacana negatif tentang LSM itu sendiri.

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana akuntabilitas keuangan organisasi LSM dipahami dan diterapkan pada WALHI Sulawesi Tengah?

3. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan makna dan bentuk akuntabilitas keuangan pada organisasi LSM. Penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan kondisi yang terjadi pada organisasi secara nyata dan natural. Sebagaimana Spradley (1997) mengungkapkan bahwa: “Makna, dalam satu bentuk atau bentuk lainnya, menyampaikan pengalaman sebagian besar umat manusia di semua masyarakat”.

4. KONTRIBUSI PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi kepentingan ilmu pengetahuan ekonomi, sosial, budaya dan *governance* serta dapat

bermanfaat bagi organisasi dan pihak yang terlibat didalamnya. Selain itu penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi tambahan referensi dan wacana ilmiah bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian pada lembaga-lembaga sektor publik di luar lembaga pemerintah.

5. KAJIAN LITERATUR

5.1 Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai Organisasi Sektor Publik

Di Indonesia, organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan organisasi sosial di luar pemerintah yang berbadan hukum. Organisasi dicirikan sebagai organisasi sosial dan tidak bertujuan mencari keuntungan dalam sistem masyarakat. Ini merupakan karakteristik pembeda antara LSM dengan organisasi lain (Teegan *et al.*, 2004, dalam Fikri dkk., 2010). LSM merupakan salah satu organisasi sektor publik. Sama halnya dengan organisasi publik lainnya, LSM dituntut untuk memberikan pelayanan yang terbaik terhadap lingkungannya dengan prosedur yang transparan dan berakuntabilitas (Bastian, 2006).

LSM didefinisikan sebagai lembaga yang berada di luar sektor pemerintah maupun bisnis atau swasta, yang bergerak dalam berbagai kegiatan pembangunan atau pembelaan kepentingan umum, dan menekankan pencarian pola-pola alternatif serta pemberdayaan masyarakat. Jenis kegiatan LSM pun beraneka ragam, mulai dari bidang advokasi publik, pekerja sosial, pemberdayaan dan penyadaran, bantuan kemanusiaan, lingkungan hidup, dan hak masyarakat (*East Java Action*, 2010).

LSM sebagai organisasi publik di luar pemerintah, yang beraktivitas sesuai dengan maksud dan tujuannya berdasarkan prinsip akuntabilitas kepada masyarakat. Hal ini senada dengan pertimbangan pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Dalam akuntabilitas, terkandung unsur keadilan dan kesetaraan, sesuai dengan wacana sosial yang sering dikumandangkan oleh LSM.

5.2 Arti Penting Akuntabilitas dalam Iklim Demokrasi

Bastian (2006) mengindikasikan awal mula munculnya sektor publik dimana kebijakan *top down* yang dilakukan selama orde baru membawa krisis fiskal dan moneter negara sejak 1997. Oleh karena itu, dasar kebijakan pemerintahan kemudian berubah menjadi fokus pada kebutuhan paling dasar yakni kebutuhan publik. Dengan kata lain, model pemerintahan yang otokrasi berubah menjadi demokrasi. Pidato Jacob Utama (2003), seperti yang telah dikutip oleh Harun (2009) mengungkapkan bahwa:

”...dalam demokrasi maupun otokrasi kekuasaan itu bertabiat sama, cenderung bersalahguna. Yang membedakan dari situasi otokrasi, dalam demokrasi kekuasaan harus dikontrol, dikoreksi, dimintai pertanggungjawaban”

Pandangan ini dapat menjadi acuan dalam membangun kerangka berpikir para kaum akademisi, kalangan profesional serta pengamat sosial mengenai peran mereka terhadap makna dan arti penting saling mengawasi. Akuntabilitas dapat dilihat dalam wujud nyata praktik akuntansi. Dalam akuntansi, pengungkapan dan pemberian (penyediaan) informasi adalah hasil akhirnya. Dengan demikian, akuntabilitas merupakan suatu pertanggungjawaban yang mampu menciptakan kondisi saling mengawasi (*checks and balances system*).

Sebuah jurnal yang ditulis oleh Suchman (1995) dalam Soobaroyen dan Sannassee (2007) menyatakan bahwa eksistensi akuntansi/praktik keuangan pada organisasi non-profit memiliki sifat legitimasi dalam menciptakan persepsi umum atau asumsi bahwa tindakan yang diinginkan suatu entitas adalah tepat dan sesuai dalam suatu sistem sosial yang dibangun dari norma-norma, nilai-nilai, keyakinan dan definisi. Soobaroyen dan Sannassee (2007) juga mencatat bahwa akuntansi sebagai representasi simbolis dari rasionalitas. Akuntabilitas sebagai wujud praktik akuntansi kemudian menjadi jargon yang sangat populer, khususnya bagi organisasi-organisasi sektor publik dalam hal peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

Secara umum, akuntabilitas dipahami sebagai pertanggungjawaban terhadap tindakan dan keputusan seseorang atau lembaga. Untuk sektor nirlaba akuntabilitas berarti merupakan pemegang amanah yang baik atas sumberdaya dan kekuasaan yang diserahkan pada mereka berdasarkan mandat dan misi mereka (Roxas, 2006 dalam Herlina, 2009).

Al-Makassary (2010) dalam sebuah situs menyatakan bahwa akuntabilitas berarti kewajiban dasar bagi sebuah badan (negara, bisnis, LSM) untuk memerhatikan masyarakat atau pemegang saham untuk mengetahui berbagai kegiatan dan prestasi mereka. Prinsip ini menjamin masyarakat untuk mengetahui siapa dan bagaimana keputusan sebuah badan ditetapkan dan alasan yang mendasarinya.

Konsep akuntabilitas menempatkan LSM sebagai organisasi yang bertanggung jawab atas amanah yang dipercayakan oleh *stakeholders*, sebagaimana mandat dan misi organisasi. Dapat dilihat bahwa akuntabilitas menjadi jargon yang penting untuk diperhatikan oleh LSM, sesuai dengan identitasnya sebagai organisasi publik yang sudah seharusnya melakukan perbaikan kualitas kelembagaan publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Akuntabilitas mampu menjanjikan adanya transparansi dan kehidupan demokrasi yang ideal.

5.3 *Reporting-Involving-Responding* sebagai Wujud Akuntabilitas

Ibrahim (2004) yang dikutip oleh Al-Makassary (2010), menyatakan bahwa akuntabilitas LSM adalah proses yang menempatkan LSM bertanggung jawab secara terbuka atas apa yang diyakininya, apa yang dilakukan dan tidak dilakukannya kepada *stakeholder* (kelompok sasaran, lembaga donor, sesama Ornop, pemerintah dan masyarakat luas). Akuntabilitas diwujudkan dalam bentuk pelibatan (*involving*), cepat tanggap (*responding*) dan pelaporan (*reporting*).

Involving terkait dengan keikutsertaan dan keterlibatan secara nyata dalam aktivitas organisasi. *Responding* merupakan kepekaan dan responsibilitas terhadap dinamika yang

berkembang di masyarakat serta aktif memfasilitasi kasus-kasus publik. *Reporting* dapat memiliki arti cara, proses ataupun perbuatan melaporkan.

Akuntabilitas berarti tanggung jawab organisasi terhadap seluruh aktivitas dan pengelolaan sumber daya kepada *stakeholder* sesuai dengan visi-misinya. Akuntabilitas LSM menyangkut berbagai aspek, misalnya soal kepercayaan (*trust*), tanggung jawab dan partisipasi, demokrasi, kekuasaan, keseimbangan kepentingan pribadi, pengendalian relasi baik yang formal maupun informal yang ada di tiap organisasi ataupun pemangku kepentingan lainnya. Untuk menilai pelaporan (*reporting*), pelibatan (*involving*) dan cepat tanggap (*responding*) sebagai wujud akuntabilitas LSM, perlu dilakukan pendekatan secara intensif dan mendalam.

Pada umumnya, organisasi LSM melibatkan masyarakat dalam melaksanakan program kerjanya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi. Selain itu, LSM juga bisa dikatakan cepat dalam menanggapi kasus-kasus sosial yang sedang menjadi topik "hangat". Oleh karena itu, aspek pelaporan sebagai wujud akuntabilitas akan menjadi kajian utama dalam penelitian ini.

5.4 Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel: Suatu Upaya Pemahaman Konsep

Keuangan merupakan urat nadi organisasi karena tanpa dana (uang), program tidak bisa dilakukan. Namun perlu diingat bahwa visi, misi dan tujuan organisasi harus selalu dijadikan pedoman dalam perencanaan, pengelolaan, pertanggungjawaban, penggalangan dana maupun keberlanjutan keuangan itu sendiri. Prinsip keterbukaan dan akuntabilitas harus dibudayakan. Informasi keuangan yang bersifat terbuka, mudah diakses, diterbitkan secara teratur, dan mutakhir merupakan gambaran pengelolaan keuangan yang ideal.

Dalam buku yang dirilis oleh Yayasan Tifa (2004) diungkapkan bahwa pengelolaan keuangan mengacu pada prinsip pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif dan akuntabel. Proses pengelolaan menganut prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. Tahapan

pengelolaan keuangan meliputi: perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pengawasan, pembuatan informasi, penggalangan dana, dan keberlanjutan keuangan.

Mastuti (2007) mencatat bahwa untuk menjadi akuntabel, baik dari sisi proses maupun substansi hendaknya dipertanggungjawabkan secara tertulis kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Hasil pertanggungjawaban dan evaluasinya hendaknya juga dipublikasikan atau minimal dapat diakses oleh publik. Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan menjadi perlu untuk menciptakan rasa saling percaya antarpemangku kepentingan. Organisasi yang melakukan pengelolaan keuangan yang akuntabel adalah organisasi yang melakukan proses pengungkapan dan pemberian informasi kepada *stakeholder* atas kesadaran terhadap visi dan misinya.

Dapat dilihat bahwa akuntabilitas juga menjanjikan pembelajaran dan peningkatan. Pembelajaran yang dimaksud adalah proses perbaikan terus menerus menuju kondisi yang lebih baik dan lebih bermanfaat. Sedangkan peningkatan merupakan proses perbaikan mutu dan kualitas, baik apa yang kita berikan (*input*) maupun apa yang kita hasilkan (*output*).

6. METODE PENELITIAN

6.1 Jenis dan Paradigma Penelitian

Sebuah penelitian kualitatif dimana esensi penelitian terletak pada kekuatan narasi dan penguraian variabel yang dibahas tanpa harus melakukan pengukuran. Moleong (2006) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Iskandar (2009) menjabarkan karakteristik penelitian kualitatif yakni bersifat induktif, humanistik, serta memahami manusia dari sudut pandang mereka sendiri. Peneliti merupakan

instrument kunci. Metode ini memusatkan pada penyelidikan terhadap cara manusia memaknai kehidupan sosial mereka, serta bagaimana manusia mengekspresikan pemahaman mereka melalui bahasa, suara, perumpamaan, gaya pribadi maupun ritual sosial (Deacon et al., 1999:6, dalam Fikri dkk., 2010). Fenomena akuntabilitas yang diterapkan oleh para aktivis sosial kadang kala merupakan sesuatu yang sulit untuk diketahui dan dipahami, serta sulit untuk dipresentasikan melalui angka-angka.

6.2 Pendekatan Analisis Wacana sebagai Metode Penelitian

Penelitian ini diawali rasa keingintahuan penulis berkaitan dengan adanya berbagai macam kritik menyangkut akuntabilitas keuangan LSM. Secara lisan maupun tulisan, wacana mengenai akuntabilitas LSM terus dipertanyakan. Mengutip Potter dan Wetherell (1987) dalam Daymon dan Holloway (2001) yang menyatakan bahwa:

“Teks-teks sosial (wacana) tidak melulu merefleksikan atau mencerminkan objek, peristiwa dan kategori yang telah ada dalam dunia sosial dan alam. Teks-teks tersebut aktif mengkonstruksi (membangun) sebuah versi dari hal-hal tersebut. Mereka tidak hanya menggambarkan berbagai hal; mereka melakukan banyak hal. Dan, dengan aktif melakukan semua itu, teks-teks tersebut mempunyai implikasi sosial dan politis”.

Sobur (2001) dalam Basrowi dan Sukidin (2002) mencatat bahwa wacana merupakan rangkaian ujar atau rangkaian tindakan tutur yang mengungkapkan sesuatu hal yang disajikan secara teratur dan sistematis dalam kesatuan yang koheren, yang dibentuk oleh unsur segmental maupun non-segmental. Wacana tidak pernah salah atau benar karena kebenaran yang diproduksi selalu kontekstual dan bergantung pada aturan-aturan yang berlaku (Basrowi dan Sukidin, 2002).

Analisis wacana adalah seperangkat prinsip metodologis yang luas, diterapkan pada bentuk-bentuk ujaran/percakapan dan teks, baik yang terjadi secara alamiah maupun yang telah direncanakan sebelumnya. Analisis wacana berkepentingan dengan konteks budaya dan politik tempat wacana itu terjadi, serta cara bahasa tersebut dipakai dan ditata (Daymon dan

Holloway, 2001). Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya mengenai akuntabilitas organisasi LSM, maka untuk menjawab segala permasalahan penelitian perlu dilakukan pengamatan dan analisa terhadap perilaku dari manusia itu sendiri dalam melakukan kegiatan sehari-hari, karena setiap manusia memiliki persepsi masing-masing yang akan mendorong mereka melakukan kegiatan tersebut. Perilaku manusia dapat diamati melalui teks-teks sosial (wacana) yang terbentuk dalam suatu komunitas.

6.3 Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan bentuk pendekatan penelitian kualitatif dan sumber data yang akan digunakan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan observasi, wawancara yang mendalam dan studi dokumen. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *snowball sampling*. Peneliti menggunakan teknik tersebut dalam kondisi ketika sulit mengidentifikasi informan-informan yang bermanfaat bagi riset, atau informan yang tidak mudah diakses, atau ketika anonimitas (keadaan tanpa nama) menjadi syarat penelitian.

6.4 Teknik Analisis Data

Melakukan analisis berarti melakukan kajian untuk memahami struktur suatu fenomena yang berlaku dilapangan. Meskipun tidak ada langkah dan aturan baku untuk mengerjakan proses analisis kualitatif, namun reduksi data dan interpretasi data adalah hal yang lazim dilakukan. Reduksi data merupakan proses memilah-milah serta mengumpulkan data-data penting dan merangkumnya menjadi data yang lebih sederhana dan tajam. Selanjutnya peneliti melakukan interpretasi data, dimana makna dan pemahaman terhadap temuan penelitian dikomunikasikan kedalam bentuk laporan tertulis. Data yang telah melalui proses reduksi kemudian dipahami kembali dan di analisis secara teratur sehingga menghasilkan kesimpulan yang memiliki makna.

Peneliti melakukan analisis dan pemahaman melalui teknik-teknik yang sesuai dengan tatanan prosedur analisis wacana sebagai pendekatan penelitian. Dalam melakukan analisis, peneliti berupaya mengidentifikasi kerangka keyakinan (repertoar interpretatif) yang memandu dan mempengaruhi individu-individu dalam mengkonstruksi versi/pandangan mereka mengenai topik penelitian tersebut.

7. Mengetahui LSM dalam Bingkai WALHI

7.1 “History” WALHI

Kesadaran masyarakat dunia akan pelestarian lingkungan hidup dan keadilan sumber daya alam sebagai bagian integral dari kehidupan, mendorong tumbuhnya gerakan lingkungan yang diawali dengan konvensi, deklarasi Stocholm - Swedia pada tahun 1972. Dalam perkembangan selanjutnya, konferensi di Rio DeJeneiro-Brazil pada tahun 1992, untuk pertama kalinya tidak hanya mengangkat masalah lingkungan menjadi perdebatan serius karena merosotnya keanekaragaman hayati, bertambahnya jumlah penduduk, terlebih-lebih menyangkut keadilan antara generasi, deskriminasi, kaum miskin dibelahan bumi selatan dan demokratisasi, hak cipta.

Atas keperihatinan itu, pada tahun 1980 di Jakarta telah berdiri Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) yang telah diprakarsai oleh aktivis NGO,s, Kelompok Pencinta Alam dan Kelompok Swadaya Masyarakat. Setahun kemudian 1981, menyusul berdiri Forum Daerah Walhi Region Sulawesi (Utara, Tengah dan Selatan) atas prakarsa 25 organisasi yang concern terhadap masalah lingkungan hidup yang terdiri dari Kelompok Pencinta Alam (KPA), LSM dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) .

Selang waktu satu tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 17 September 1982 di Sulawesi Tengah telah berdiri WALHI Sulteng. Setelah restrukturisasi WALHI secara nasional, WALHI Sulawesi Tengah berkembang menjadi Forum Organisasi Non Pemerintah

yang memposisikan diri sebagai wahana yang mensinergikan semua potensi gerakan advokasi lingkungan hidup dan penguatan akses rakyat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.

7.2 Status WALHI Sulteng

WALHI Daerah Sulawesi Tengah adalah forum jaringan kerja dan pengambilan keputusan anggota di daerah yang mendasarkan gerakan pada prinsip kesederajatan dan kesamaan hak dan tanggungjawab terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Berikut ini menunjukkan struktur organisasi nasional, yang memiliki jaringan kerja di daerah (Lihat Gambar 7.1, hal 23).

8. TEMUAN PENELITIAN

8.1 Mekanisme Kelembagaan

Sama halnya dengan organisasi pada umumnya, LSM juga memiliki struktur kelembagaannya masing-masing. Melihat maraknya organisasi-organisasi sektor publik yang bermunculan, maka untuk menciptakan suatu keteraturan pemerintah sebagai administrator Negara mengeluarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Dalam undang-undang tersebut mencatat bahwa yayasan adalah berbadan hukum, yang didirikan dengan akta notaris. Sesuai dengan Bab II Pasal 14 tentang pendirian, setiap yayasan harus memiliki Akta Pendirian yang memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain yang dianggap perlu. Sebagai LSM yang berbadan hukum, WALHI juga memiliki beberapa peraturan dasar yakni Statuta dan *Standard Operational Procedure* (SOP).

Melalui studi dokumen Statuta WALHI, peneliti memperoleh deskripsi mengenai mekanisme kelembagaan dalam organisasi WALHI sehingga “garis” tanggung jawab menjadi jelas. Pada pasal 10 mencatat bahwa kelembagaan di dalam organisasi WALHI terdiri dari: Eksekutif Nasional; Eksekutif Daerah; Dewan Nasional; dan Dewan Daerah.

Statuta WALHI juga menjelaskan mengenai definisi serta tugas dan tanggung jawab masing-masing struktur organisasi.

8.2 Akuntabilitas Vertikal

LSM bertanggungjawab secara langsung kepada pemberi amanah terhadap sumberdaya ataupun dana yang dikelolanya. Akuntabilitas tersebut diwujudkan dalam bentuk pelaporan (*reporting*), pelibatan (*involving*) dan cepat tanggap (*responding*) (Ibrahim, 2004, dalam Al-Makassary, 2010). Pengelolaan keuangan yang akuntabel menunjukkan kredibilitas setiap organisasi sehingga masing-masing LSM dapat melaksanakan program kegiatannya secara berkelanjutan.

Hubungan Eksekutif Nasional dan Eksekutif Daerah bersifat konsultatif bila itu berkaitan dengan bobot dan materi program yang sedang dilaksanakan. Hubungan Eksekutif Nasional dan Eksekutif Daerah bersifat fasilitatif terhadap program yang telah disepakati bersama. Dana yang dikelola oleh Eksekutif daerah berupa dana program dan pengembangan institusi, yang bersumber dari Eksekutif Nasional. Selain itu, dana juga bersumber dari iuran anggota serta sumbangan dari perorangan maupun lembaga, yang tidak mengikat dan tidak berasal dari lembaga-lembaga pemberi hutang seperti WB, ADB, IMF dan sebagainya. Namun tidak menutup kemungkinan bagi donor yang ingin langsung mengucurkan dananya bagi program WALHI di daerah. Maka secara garis besar, Eksekutif Daerah bertanggungjawab langsung (vertikal) kepada “si” pemberi dana, baik Eksekutif Nasional maupun Lembaga Donor.

Berdasarkan kajian dokumen, tidak nampak adanya *urgency* dalam hal pertanggungjawaban kepada pemerintah. Aliran dana bagi WALHI berasal dari beberapa Lembaga Donor di Eropa. Dana tersebut di bagi oleh Eksekutif Nasional ke masing-masing Eksekutif Daerah sesuai dengan program yang telah disetujui bersama. Maka dalam hal

pertanggungjawaban ataupun pelaporan, Eksekutif Daerah harus menyampaikannya kepada Eksekutif Nasional setelah melalui proses audit internal oleh dewan daerah.

Sesuai dengan SOP WALHI, Dewan Daerah memiliki kewenangan menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit eksternal bagi Eksekutif Daerah yang mengelola dana diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) pertahun. Hal ini juga senada dengan yang tercantum dalam UU No. 16 tahun 2001 pasal 52 tentang Yayasan yang mewajibkan yayasan yang memperoleh bantuan diatas Rp. 500.000.000,- pertahun untuk di audit oleh akuntan publik. Dengan demikian, akuntabilitas secara vertikal telah terpenuhi.

8.3 Akuntabilitas Horizontal

Dalam SOP WALHI Bab 5, pengelolaan keuangan didefinisikan sebagai tindakan administratif yang berhubungan dengan kegiatan perencanaan anggaran, penyimpanan, penggunaan, pencatatan dan pengawasan keluar-masuknya uang/dana organisasi. Lagi dalam SOP WALHI mencatat:

”Pengelolaan keuangan harus dilandasi pada asas transparansi dan akuntabilitas, baik secara internal organisasi dalam arti dimana seluruh komponen WALHI berhak mendapatkan informasi tentang posisi keuangan dan tata cara pengelolaannya, maupun asas transparansi dan akuntabilitas kepada publik yang dilakukan dalam mekanisme audit eksternal”.

Berdasarkan prinsip tersebut, maka dapat dilihat bahwa *stakeholder* (pemangku kepentingan) tidak hanya terbatas dalam struktur kelembagaan, tetapi juga kepada seluruh komponen WALHI. WALHI menurut kesadaran dan kewajiban untuk mengamalkan aturan dasar organisasi, memiliki tanggungjawab secara horizontal kepada seluruh komponen WALHI yang tidak berada di atasnya tanpa ada istilah *privacy* dalam hal pengelolaan keuangan. Karena efek yang ditimbulkan dari keengganan akuntabilitas yakni memperlambat mekanisme transparansi dan adopsi pengungkapan (seperti pada tata kelola perusahaan dan standar akuntansi) di setiap bidang masyarakat, termasuk *Voluntary Organizations* (organisasi sukarela).

Peneliti kemudian melakukan observasi dimana WALHI Sulteng telah membuat laporan tahunan dan membagi-bagikannya kepada publik sebagai bukti bahwa WALHI juga berupaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan profesionalitasnya sebagai sebuah organisasi. Pandangan ini juga didukung oleh pendapat Gray et al, (2006) serta Taylor dan Warburton (2003), dimana kontrol terhadap praktik-praktik keuangan merupakan aspek penting dalam mengejar kredibilitas penerimaan sosial, terutama bagi organisasi sosial yang ingin terus bertahan hidup dan memiliki pengaruh di masyarakat (Soobaroyen dan Sannassee (2007).

Hal senada juga diungkapkan oleh informan pertama seperti berikut ini:

I1: “Sebagai lembaga publik, kami merasa perlu menjaga kepercayaan masyarakat dengan cara menginformasikan kegiatan dan dana yang kami kelola. Kami merasa tanggungjawab kami agar publik mengetahui apa yang kami lakukan. Yaa demi *public trust* itu tadi...”

Melalui penelusuran dokumen, peneliti juga memperoleh bukti bahwa mekanisme pertanggungjawaban keuangan LSM juga berasas pada akuntabilitas publik. UU No. 16 tahun 2001 pasal 52 menetapkan hal-hal yang menyangkut laporan tahunan yayasan. Regulasi tersebut menggambarkan bahwa akuntabilitas publik diwujudkan melalui mekanisme audit eksternal. Tidak berbeda dengan aturan umum tersebut, SOP WALHI Bab 4 juga menetapkan bahwa audit eksternal juga harus dilakukan oleh WALHI Daerah yang mengelola dana di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pertahun, dengan prosedur yang sama dengan audit eksternal yang dilakukan terhadap WALHI Nasional. Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan, audit eksternal hanya dilakukan oleh Eksekutif Nasional karena Eksekutif Daerah WALHI Sulteng belum memenuhi kriteria audit eksternal. Dengan kata lain, tuntutan akuntabilitas publik menjadi *urgent* apabila organisasi mengelola dana di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pertahun.

Berdasarkan data dan analisis yang dilakukan, peneliti melihat bahwa faktor regulasi sangat mempengaruhi akuntabilitas lembaga, termasuk LSM. Disamping itu, kesadaran dari masing-masing lembaga yang dicerminkan dalam aturan organisasi akan mendukung

mekanisme kerja dalam organisasi itu sendiri. Pendapat tersebut juga didukung oleh Suchman (1995) dalam Soobaroyen dan Sannasee (2007) yang menyatakan bahwa implementasi praktik akuntansi adalah untuk menciptakan persepsi umum atau asumsi bahwa tindakan yang diinginkan suatu entitas adalah tepat, atau sesuai dalam suatu sistem sosial yang dibangun dari norma-norma, nilai-nilai, keyakinan dan definisi. Berdasarkan pemikiran di atas, maka akuntabilitas publik juga merupakan hal yang penting dan perlu dilaksanakan oleh setiap LSM. Seperti sebuah kalimat bijak yang berkata:

“Bangsa yang baik berasal dari masyarakat yang baik. Masyarakat yang baik berasal dari keluarga yang baik. Keluarga yang baik berasal dari individu yang baik. Dan individu yang baik dibangun dari kebiasaan-kebiasaan yang baik.”

8.4 Kontradiksi Akuntabilitas Publik

Lahirnya era reformasi pada tahun 1998 membawa wacana kebebasan untuk berbicara dan menentukan pendapat secara terbuka. Dengan demikian, timbullah kecenderungan untuk saling mengkritik atas apa yang telah dilakukan oleh seseorang ataupun instansi. Seiring berjalannya waktu, LSM yang mengkritisi jalannya roda pemerintahan juga menuai kritikan. Banyak tuduhan mengenai penyelewengan dana dimuat dalam tulisan baik di media massa maupun internet akibat tuntutan akuntabilitas publik yang tidak mampu dipenuhi oleh LSM. Namun demikian, tidak sedikit praktisi LSM menyanggah tuduhan-tuduhan tersebut dengan mencoba memberikan pemaparan sebagai berikut (informan kedua):

I2: “LSM memang adalah lembaga publik, namun hal tersebut dinyatakan dalam bentuk program. Sebagai lembaga publik, LSM wajib memberikan pemahaman mengenai hak-hak publik serta melakukan pembelaan ataupun pendampingan kasus bila terjadi pelanggaran HAM oleh pemerintah ataupun swasta. Dalam hal dana, LSM tidak perlu bertanggung jawab kepada masyarakat karena dana tersebut berasal dari donor, bukan dari masyarakat. LSM bertanggung jawab kepada masyarakat dalam hal pelaksanaan program”.

Dalam proses perampungan penelitian ini, diwaktu yang berbeda, peneliti juga bertemu dengan dua (2) orang dari kalangan akademisi yang sekaligus berprofesi sebagai

praktisi LSM. Pro dan kontra pun terjadi menyusul wacana akuntabilitas publik yang peneliti ajukan seperti yang ditegaskan oleh informan ketiga:

I3: “Akuntabilitas LSM bukan milik publik, milik donor. Apanya yang mau dipertanggungjawabkan ke publik, sedangkan kucuran dana dari donor!”

Malah dengan sedikit nada tersinggung, informan tersebut melanjutkan pembicaraan sembari mengeluarkan tumpukan kertas tebal dan berkata:

I3: “Jadi saya harus membuat laporan keuangan setebal ini dan membagi-bagikannya ke publik?!”

Melalui konstruk kejadian di atas, peneliti berkesimpulan bahwa tutur dan sikap informan tersebut menggambarkan persepsi dan keyakinannya terhadap ketidakpentingan akuntabilitas publik dari sisi LSM. Bila ditinjau dari alur kepemilikan dana, LSM memang didanai oleh lembaga donor ataupun masyarakat dalam bentuk sumbangan (Pahala Nainggolan, 2005). Wajar saja bila ada yang menilai bahwa pertanggungjawaban keuangan secara umum tidak perlu, mengingat dana yang diberikan berasal dari “saku” orang lain.

Namun di atas dari semuanya, ideologi dan identitas sebagai lembaga publik sangatlah penting bagi LSM. Hal tersebut menyangkut kepercayaan publik dan keberlangsungan hidup organisasi yang bisa diperoleh melalui akuntabilitas publik. Pernyataan yang senada juga dilontarkan oleh informan keempat, dengan profesi yang sama dengan informan sebelumnya yakni:

I4: “Masyarakat perlu mengetahui aktivitas mereka, uang dari lembaga donor mereka apakah, program yang mereka janjikan kepada donor dan masyarakat sudah jalan atau belum, dan lain-lain. Jangan Cuma berkoar-koar menuntut transparansi dan akuntabilitas pemerintah dong, organisasi sendiri juga harus bisa memberi contoh yang baik”.

Pada lain kesempatan, peneliti juga merekam suatu pengakuan dari informan pertama sebagai berikut:

I1: “Saya tidak menafikan bahwa ada LSM yang bobrok. Tapi tidak semua LSM seperti itu, sesuai dengan aturan masing-masing. Sejauh ini yang kami ketahui bahwa sebagian LSM yang melakukan “suit” anggaran, bukan korupsi”.

Pengakuan tersebut membuktikan bahwa LSM tidak luput dari kasus penyelewengan dana akibat kurangnya pengawasan. Informan juga menjelaskan bahwa beberapa LSM bukan melakukan penyelewengan melainkan penyisihan anggaran yang berasal dari dana program. Anggaran tersebut disisihkan untuk kegiatan operasional lembaga. Hal ini biasa terjadi pada LSM yang memiliki modal tidak terlalu besar, namun harus tetap menjaga keberlangsungan aktivitas dan bukannya untuk memperkaya diri seperti “*guyonan*” informan kedua, berikut ini:

I2: “Kalau ada praktisi LSM yang kaya, nah itu patut dicurigai kekayaannya. Apakah dari hasil usaha sendiri diluar LSM atau dana hasil korupsi dan “melacurkan” idealismenya”.

Melalui pemaparan di atas, dapat dilihat bahwa masyarakat “haus” akan pengetahuan dan informasi. Akuntabilitas praktis dari organisasi publik yang coba peneliti pahami dan deskripsikan adalah suatu pertanggungjawaban moral yang dituangkan secara nyata dalam bentuk penyediaan informasi bagi publik. Seperti yang juga diungkapkan oleh Sri Mastuti (2007) bahwa “untuk menjadi akuntabel, segala sesuatunya hendak dipertanggungjawabkan dan hasilnya dipublikasikan atau minimal dapat diakses oleh publik”. Dengan demikian, segala bentuk kecurangan dapat dihindari dan diminimalisir.

8.5 Public Opinion

Melalui observasi dan studi dokumentasi yang peneliti lakukan, peneliti juga melihat lemahnya tingkat kesadaran masyarakat Sulawesi Tengah akan arti penting sebuah akuntabilitas. Sebagian masyarakat tidak begitu peduli terhadap keuangan LSM mengingat aktivitas LSM selama ini dilakukan dengan pola kemitraan. Melalui pendekatan ini, kebanyakan LSM memiliki hubungan emosional yang cukup baik dengan masyarakat sehingga mereka memperoleh kepercayaan dari masyarakat.

Pada umumnya masyarakat tidak begitu peduli keberadaan LSM, terlebih lagi pada masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan. Kebanyakan LSM melakukan advokasi di

daerah-daerah pinggiran kota dan di desa-desa terpencil yang masih kurang informasi serta yang hak-haknya terabaikan oleh para pemangku kebijakan. Keterangan informan pertama juga menunjukkan kurangnya perhatian dari masyarakat terhadap aktivitas organisasi:

I1: “Sejauh ini masyarakat belum begitu peduli dengan isu lingkungan, apalagi dengan pengelolaan keuangan oleh organisasi. Adapun masyarakat yang memberikan apresiasi terhadap LSM, namun tidak begitu menaruh perhatian pada keuangan organisasi. Mereka lebih peduli pada program, mengenai pencapaian dan hasil program.”

Pernyataan diatas menunjukkan kebutuhan masyarakat meliputi pencapaian dan hasil program kegiatan LSM. Masyarakat lebih memilih untuk dapat menikmati pencapaian serta hasil program LSM ketimbang saling menuntut mengenai tata cara pengelolaan keuangan. Selain masyarakat merasa itu bukan dana mereka, faktor kepercayaan juga menjadi salah satu alasan mengapa masyarakat merasa tidak perlu dan tidak ingin tahu tentang masalah keuangan. Ada sebagian masyarakat masih menganggap uang sebagai sesuatu yang sensitif. Oleh karena itu, faktor uang bukan menjadi hal yang penting untuk diperbincangkan, melainkan program pemberdayaan dan pencapaiannya secara nyata. Itulah yang dianggap lebih penting karena merupakan prestasi bagi setiap organisasi yang mampu mencapai target sesuai dengan tujuannya masing-masing.

Dengan demikian, peneliti mengidentifikasi terdapat dua masalah yang tidak dapat terelakan. Pertama, masyarakat yang lebih memprioritaskan pada pencapaian kinerja LSM dan percaya terhadap praktek-praktek keuangan LSM, sehingga terkesan tidak begitu peduli dengan keuangan didalamnya. Hal tersebut yang membuat LSM masih merasa “nyaman” dalam melakukan praktik-praktik keuangan tanpa perlu menyediakan informasi ataupun publikasi. Kedua, kelompok masyarakat yang menilai lemahnya akuntabilitas keuangan LSM akibat kurangnya akses dan informasi mengenai aktivitas internal LSM itu sendiri.

Berdasarkan wacana-wacana yang berkembang, akuntabilitas sesungguhnya menjadi tema yang sangat tepat untuk menjembatani hubungan antara LSM dan *stakeholder*'nya serta

kebutuhan publik terhadap informasi. Akuntabilitas merupakan praktik akuntansi yang meliputi tersedianya informasi serta terbukanya akses untuk memperoleh informasi tersebut. Mengingat akuntansi merupakan representasi simbolis dari rasionalitas (Soobaroyen dan Sannasee, 2007), maka tuntutan terhadap akuntabilitas tidak melulu sebagai cerminan dari kecurigaan dan keburukan tetapi juga sebagai gambaran dari sebuah perkembangan zaman, teknologi dan pola pikir manusia yang senantiasa berubah dalam mengupayakan perbaikan yang berkesinambungan.

9. AKHIR PENELITIAN

9.1 Kesimpulan

Akuntabilitas publik pada LSM khususnya WALHI Sulawesi Tengah, didasarkan pada sebuah sirkulasi hubungan yang diawali kesadaran individu-individu sebagai LSM yang “notabene” adalah lembaga publik, dan kemudian dituangkan dalam sebuah aturan yang menjadi pedoman mekanisme organisasi. Aturan tersebut lalu diwujudkan dalam suatu aksi nyata dalam bentuk penyediaan laporan, informasi maupun akses publik terhadap organisasi. Aksi tersebut yang kemudian akan dinilai, baik positif maupun negatif, dan menghasilkan “*feedback*” oleh publik sesuai dengan penilaian masing-masing.

Akuntabilitas LSM merupakan hal yang mutlak diperlukan dalam tanggungjawab terhadap donor yang telah mendanai program-program kegiatan organisasi. Namun dilain pihak, akuntabilitas publik juga menjadi tuntutan bagi LSM sebagai Lembaga sektor publik yang telah melakukan “pengatasnamaan” dan program-program pemberdayaan masyarakat. Akuntabilitas publik tersebut tidak lepas dari kesadaran masing-masing pihak, baik *stakeholders* maupun LSM itu sendiri. Tuntutan terhadap akuntabilitas tidak melulu sebagai cerminan dari kecurigaan dan keburukan, tetapi juga sebagai gambaran dari sebuah

perkembangan zaman, teknologi dan pola pikir manusia yang senantiasa berubah dalam mengupayakan perbaikan yang berkesinambungan.

9.2 Saran

Agar keseimbangan informasi dapat terpenuhi, maka diperlukan kesadaran dan perhatian dari masyarakat, baik kalangan akademisi maupun segenap praktisi LSM, khususnya para aktivis WALHI untuk dapat menyediakan laporan, informasi maupun akses terhadap LSM itu sendiri. Selain itu, WALHI beserta seluruh komponen LSM juga diharapkan untuk dapat berbesar hati menerima mekanisme kontrol/pengawasan sebagai wujud dari kepedulian publik terhadap LSM. Dengan demikian, kritik, kecurigaan dan tuduhan buruk pun dapat diminimalisir. Distribusi informasi akan menjadi sangat penting untuk menciptakan kerjasama, kepercayaan dan komunikasi yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriani, Iyan H.S . 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. <http://www.penalarnan-unm.org> (Di download tanggal 17 Februari 2011).
- Al-Makassary, Ridwan. 2010. *Akuntabilitas Lembaga Swadaya Masyarakat: Beberapa Observasi*. <http://www.interseksi.org> (Di download tanggal 13 Januari 2011).
- Basrowi dan Sukidin. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif; Perspektif Mikro*. Insan Cendikia. Surabaya.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Erlangga. Jakarta.
- Daymon, Christine and Holloway, Immy. 2001. *Metode-Metode Riset Kualitatif*. Bentang. Yogyakarta.
- East Java Action. 2010. (didownload tanggal 9 Januari 2011)
- Fikri, Ali, Made Sudarma, Eko Ganis Sukoharsono, Bambang Purnomosidhi, dan Iwan Triyuwono. 2010. “*Studi Fenomenologi Akuntabilitas Non Governmental Organization*”, *Simposium Nasional Akuntansi (SNA) 13*. Purwokerto.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2001. *Teori Akuntansi*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Harun. 2009. *Reformasi Akuntansi Dan Manajemen Sektor Publik Di Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta.

Herlina, Lucy. 2009. *Respon LSM Terhadap Tantangan Akuntabilitas : Pengalaman KPMM dan Komunitas LSM di Negara Lain*. <http://www.kpmm.or.id> (Di download tanggal 13 Januari 2011).

Iskandar. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Gaung Persada. Jakarta

Mastuti, Sri. 2007. "*Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender*". Civic Education and Budget Transparency Advocay (CiBa). Jakarta.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.

Nainggolan, Pahala. 2005. *Akuntansi Keuangan Yayasan dan Lembaga Nirlaba Sejenis*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta

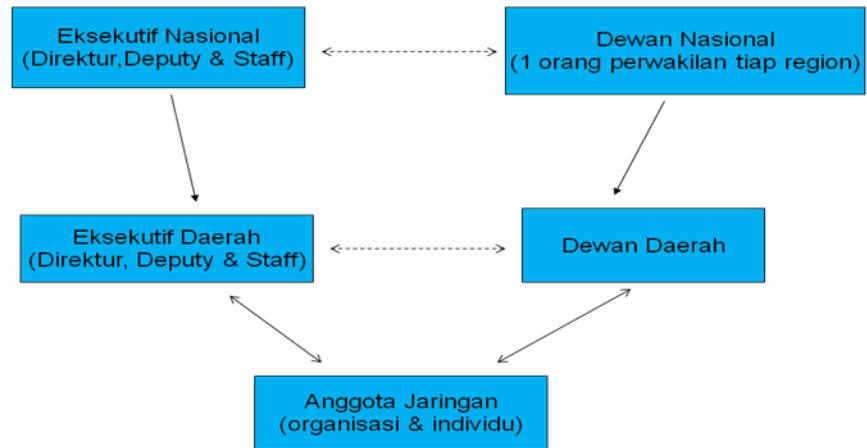
Soobaroyen, Teerooven dan Sannasee, Raja Vinesh. 2007. *An exploratory study of financial priorities, financial planning and control practices in voluntary organizations. Perception of treasurers in a developing country*. ©Emerald Group Publishing Limited.

Yayasan Tifa. 2004. *Mengukur Transoaransi dan Akuntabilitas LSM*.
<http://konsillsm.or.id/dokumen/Kode%20Etik%20LSM%20Dunia/TANGO.pdf> (didownload tanggal 25 Februari 2011)

www.kamusbahasaIndonesia.org

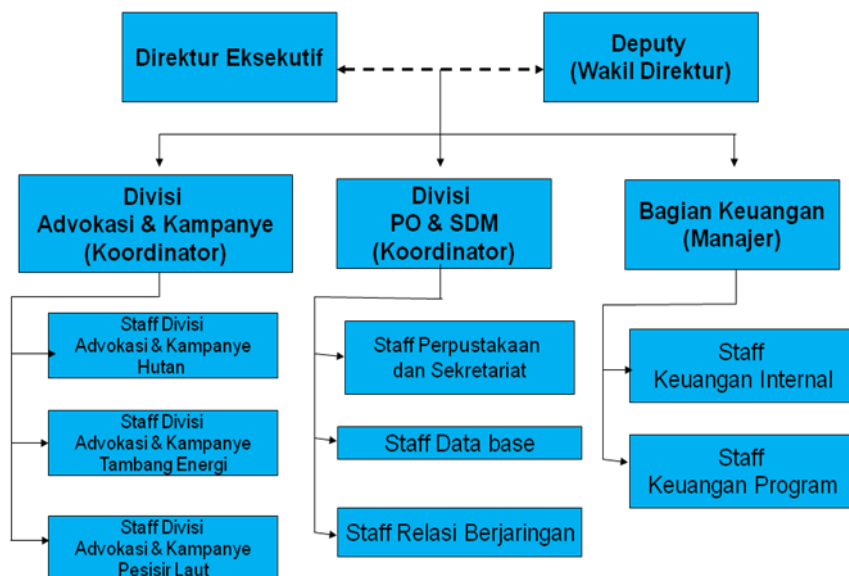
LAMPIRAN

Gambar 7.1
Struktur Organisasi Nasional



Sumber: Dokumen ED-WALHI Sulteng

Gambar 7.2
Struktur ED- Walhi Sulawesi Tengah



Sumber: Dokumen ED-WALHI Sulteng

Judul :

**AKUNTABILITAS LSM, MILIK DONOR ATAU PUBLIK?
(STUDI ANALISIS WACANA STUDI PADA KANTOR EKSEKUTIF DAERAH WALHI SULAWESI TENGAH)**

- 1. Bidang Kajian** : Akuntansi Sektor Publik Good Governance
- 2. Metode Penelitian** : Penelitian Kualitatif.
- 3. Curriculum Vitae**

Nama : Meity Ferdiana Paskual, SE
Alamat
Rumah : Jl. Anoa 1 No. 87 D, Palu. Hp. 085241228383
Email: pascoalmeity@yahoo.com
Kantor : Kampus Bumi Tadulako, Tondo - Palu
Pekerjaan : Staf di Lembaga Pusat Penelitian Pedesaan
Pendidikan :

- Strata Satu (S1) Akuntansi Fak. Ekonomi Universitas Tadulako, Palu, 2012.

Palu, Juni 2012

Meity Ferdiana Paskual, SE

CURRICULUM VITAE

A. DATA DIRI

Nama Lengkap dan Gelar : Muhammad Ansar, SE., MSA., Akt
Pekerjaan : Dosen Tetap Fakultas Ekonomi – Jur. Akuntansi
Universitas Tadulako Palu
Alamat Kantor : Kampus Bumi Tadulako, Tondo - Palu
Alamat Rumah : Jln. Ds. Lamangkona No. 32 Panau, Palu
Mobile : 081334411192
Email : ancha_lee16@yahoo.com

C. PENDIDIKAN TINGGI

- Magister Sains Akuntansi (S2) Program Pascasarjana Fak. Ekonomi Universitas Brawijaya Malang, 2009
- Strata Satu (S1) Akuntansi Fak. Ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar, 2003.
- Diploma Tiga (D3) Akuntansi Fak. Ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar, 1998.

C. ORGANISASI KEANGGOTAAN

- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)

D. PUBLIKASI ILMIAH & PENELITIAN

- ARTIKEL/BUKU
 - ✓ Reformasi Sektor Publik (kolom opini di Harian Fajar), tanggal 16 Desember 2004
 - ✓ Dampak *Subsequent Events Review* terhadap Laporan Audit (Jurnal Persepsi, No. 16, Vol. VIII), tahun 2004.
 - ✓ Internet dan Dunia Pendidikan (Jurnal Teknologi dan Manajemen Informatika Univ. Merdeka, Malang), No. 4, Vol. 6, Nopember 2008
 - ✓ Akuntansi Sektor Publik (penulis kedua), Jurusan Akuntansi Fak. Ekonomi Untad, tahun 2004.
 - ✓ Kesalahan Auditor, Pelanggaran Standar atau Kejahatan Profesi? (Sebuah Studi Fenomenologis), Jurnal Transaksi FE-Akuntansi Untad, Januari-Juni 2010
 - ✓ Akuntabilitas dalam Perspektif Gereja Protestan (Studi Fenomenologis pada Gereja Protestan Indonesia Donggala Jemaat Manunggal Palu), SNA XIV Aceh, Juli 2011
- Penelitian
 - ✓ Pengaruh Desentralisasi dan Ketidakpastian Lingkungan terhadap Kinerja Manajer pada Perusahaan Berskala Besar di Kota Palu, Oktober 2006.
 - ✓ Sinergi Yin dan Yang sebagai Refleksi Kualitas Audit (Studi pada salah satu Kantor Akuntan Publik di Jakarta), Januari 2009, (tesis Magister Sains Akuntansi, Fak. Ekonomi Brawijaya).

Palu, Juni 2012

Muhammad Ansar, SE., MSA., Akt.

Surat Pernyataan

Melalui surat ini, penulis menyatakan bahwa artikel yang berjudul “Akuntabilitas LSM, Milik Donor atau Publik? (Studi Analisis Wacana Pada Kantor Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah)” tidak pernah dipublikasikan dimanapun sebelumnya.

Demikian surat ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palu, Juni 2012

Penulis I

Meity Ferdiana Paskual

Penulis II

Muhammad Ansar